



► PEMILU 2019

# Indikasi Pelanggaran APK Tinggi

**KOTAGEDE**—Sejak kampanye resmi dimulai pada Minggu (23/9) lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jogja sudah mengendus tingginya indikasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Abdul Hamid Razak  
[hamied@harianjogja.com](mailto:hamied@harianjogja.com)

► Bawaslu bisa langsung merekomendasi penertiban pelanggaran APK kepada Satpol PP.

► Jalur hijau di Jogja juga terlarang bagi pemasangan APK.

Untuk itu Bawaslu Jogja bisa langsung memberikan rekomendasi ke Satpol PP Jogja untuk menertibkan APK yang dinilai melanggar. Dengan begitu Bawaslu tidak perlu terlebih dulu menyampaikan rekomendasi pelanggaran APK ke KPU, melainkan langsung berkoordinasi dengan Satpol PP agar segera ditertibkan.

"Baik Bawaslu maupun Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) bisa memberikan hasil kajian atau rekomendasi ke Satpol PP agar segera menertibkan pelanggaran APK," kata Ketua Bawaslu Jogja Tri Agus Inharto, Rabu (26/9). Dia mengatakan dasar hukum penertiban pelanggaran APK, sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwalkot) tentang Pemasangan APK untuk Pemilu 2019. Akan tetapi dalam regulasi itu belum ditetapkan batas waktu maksimal bagi Satpol PP untuk menindaklanjuti rekomendasi

dari Bawaslu. "Padahal sudah ada banyak indikasi APK yang melanggar seperti dipasang di tiang telepon, tiang listrik, pohon serta di bangunan cagar budaya," katanya.

Aturan mengenai ukuran APK kata Tri Agus, harus disesuaikan dengan PKPU No.23/2018 tentang Kampanye Pemilu, misalnya ukuran spanduk maksimal 1,5 meter x 5 meter. Sebelumnya, ukuran spanduk maksimum bisa mencapai 5 meter x 7 meter.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan Pemkot juga melarang jalur hijau sebagai tempat pemasangan APK. Di antaranya mulai dari Jl. Urip Sumoharjo hingga Jl. Diponegoro; Jl. Margo Utomo hingga Titik Nol Kilometer; serta Jl. Kusumanegara hingga kawasan Ngabean.

"Ada juga titik-titik yang harus steril dari alat peraga kampanye, seperti jembatan, tempat ibadah dan sekolah," katanya.

Heroe berharap Bawaslu dan Satpol PP bisa saling bersinergi untuk melakukan penertiban APK. Untuk potensi gesekan selama kampanye, Heroe optimistis akan berkurang dibanding Pemilu sebelumnya.

**PEMILIHAN UMUM  
2019**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005